

Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan

Andi Aswirman (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: andi.aswirman@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah,

Keywords: pemekaran kabupaten Bone Selatan, Hak otonomi

Abstrak

This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region,

Keywords: Bone splitting district South, autonomous Rights

PENDAHULUAN

Salah satu perubahan yang mendasari dalam era Reformasi saat ini adalah pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Oleh karena itu daerah diberi kebebasan dan keleluasaan untuk membangun dan mengembangkan daerah

sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Otonomi daerah yang lebih luas membawa dampak terhadap perubahan dan pengembangan suatu wilayah. Salah satunya adalah dengan adanya respon pemerintah pusat terhadap pemekaran wilayah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan

pemekaran wilayah sebagai penjabaran undang-undang tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yang merupakan hasil revisi dari PP No. 129 Tahun 2000. Munculnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 telah memicu berbagai daerah untuk melakukan pemekaran wilayah yang salah satunya adalah pemekaran wilayah Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian survey dan tipe penelitian deskriptif. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Bone Selatan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung, angket, serta wawancara terhadap sejumlah informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kabupaten Bone Selatan.

Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Bone. pendapat responden tentang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bone ialah 134 responden atau 35.8% memilih kurang memuaskan, 105 responden atau 28.1% memilih cukup memuaskan, 106 responden atau 28.3% memilih memuaskan, 25 responden atau 6.7% memilih tidak memuaskan, dan 4 responden atau 1.1% memilih sangat memuaskan.

Dalam penelitian ini menghasilkan kecenderungan pada pelayanan pemerintahan yang kurang memuaskan, masalah utama

yang dihadapi responden adalah proses yang berbelit-belit pada tahap pengurusan persyaratan eKTP dan waktu proses yang lama saat pengurusan persyaratan eKTP di kelurahan.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Andi Rifai yang merupakan pegawai honorer di kecamatan Libureng, bahwa : "Dalam proses pembuatan eKTP memang sangat berbelit-belit dan memerlukan waktu lama dikarenakan proses input data yang harus rampung satu kecamatan setelah itu data baru dikirim ke pusat untuk dibuat eKTPnya yang memakan waktu sebulan". Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa proses pembuatan eKTP belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yang masih berjalan lambat.

Media yang digunakan Dalam Sosialisasi Pemekaran Kab. Bone Selatan. responden yang pernah mendengar istilah pemekaran wilayah lewat media ialah 117 responden atau 31.3% mengetahuinya dari media elektronik, 86 reponden atau 23.0% mengetahui dari media cetak, , 83 responden atau 22.2% mengetahui dari lainnya, 59 responden atau 15.8% mengetahui dari pemerintah setempat, 6 reponden atau 1.6% mengetahui dari spanduk/baligho/pamphlet,. Sedangkan jumlah responden yang tidak memilih jawaban apapun karena tidak mengetahui istilah pemekaran wilayah ialah 23 responden atau 6.1%. dari tabel diatas media elektronik sangat berperan dalam perluasan wacana, media elektronik yang di maksud adalah internet televise dan radio.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Andi Baharuddin Patong, bahwa : "Wacana pemekaran sudah berkali-kali dimuat dalam berbagai media elektronik contohnya di stasiun tv lokal yang meliput kunjung ketua DPR RI di Bone Selatan".

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa antusias masyarakat terhadap berita mengenai pemekaran Bone bagian selatan cukup tinggi. Dimana media yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pemekaran ini yaitu melalui media elektronik.

Kondisi Pendapatan masyarakat Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bone Selatan. responden yang memilih tingkat pendapatan masyarakat yang ada di Bone bagian Selatan jika benar-benar dimekarkan nantinya akan lebih baik ialah 287 responden atau 76.7%, sedangkan yang memilih sama saja ialah 72 responden atau 19.3% sedangkan yang memilih lebih buruk ada 15 responden atau 4.0%. masyarakat cenderung memilih pendapatan akan lebih baik jika pemekaran terjadi karena pemekaran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat andi adly "Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah". Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pendapatan masyarakat akan meningkat karena lapangan kerjapun sangat menjanjikan.

Faktor yang menjadi kendala pemekaran daerah otonomi baru Kab.Bone Selatan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah di lakukan bahwa yang menjadi kendala dalam

proses pemekaran daerah otonomi baru yaitu pada factor social politik hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan panitia pemekaran bone selatan yang menyatakan bahwa "kami merasa kelaurga bupati belum merelakan pemekaran bone selatan karena sampai sekarang posisi pemekaran Kab.Bone selatan di DPR-RI masih belum berada pada tahap pembahasan, kami berharap bupati dapat menepati janjinya untuk mempercepat pemekaran seperti yang di katakan pada saat kampanye. Kami belum pernah mendengar tentang rencana komunikasi politik yang akan di lakukan oleh Pa.Bupati, sebagai salah satu syarat adminstratif dalam proses pemekaran, persetujuan bupati sangatlah penting"

Berbeda dengan hasil wawancara yang saya lakuakak kepada Bupati Bone bersama Ketua DPRD Kab.Bone yang menyatakan bahwa "Kendala yang sedang di hadapi proses pemekaran di kab.bone selatan yaitu persoalan sarana dan infrastruktur yang terkait dengan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk membiayai proses pembangunan karena persyaratan adminstratif sudah mendapat respon dari daerah dengan di anggarkannya Rp.5M untuk dana pendampingan selama 3 tahun namun kita juga harus mewaspadai revisi Undang-undang tentang pemekaran yang akan mempersulit pemekaran daerah otonomi baru"

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi miss komunikasi antara masyarakat yakni panitia pemekaran dengan Pemerintah Kab.Bone Selatan, karena masyarakat menganggap Bupati Bone tidak konsisten untuk mengawal pemekaran, sedangkan bupati bone telah melakukan penganggaran sebesar Rp.5M sebagai dana pendampingan proses pemekaran

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupaten bone selatan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu : Persepsi masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Bone Selatan cenderung setuju dengan proses pemekaran karena secara potensi Sumber Daya Alam dalam bidang pertambangan yang di miliki oleh bone bag. Selatan menurut data yang di temukan oleh peneliti di Badan Pusat statistic menunjukkan bahwa potensi pertambangan di kab.bone cenderung berada di daerah bone bagian selatan. Maka dari hal tersebut memberi keyakinan para tokoh masyarakat untuk memisahkan diri dari kab.bone menjadi kab.bone selatan yang di harapkan akan mendekatkan pelayanan public ke masyarakat luas. Yang sebelumnya jarak bone bagian selatan ke bone bagian kota sangat jauh. Namun pengetahuan masyarakat tentang pemekaran sangatlah terbatas pada wacana yang kemudian masyarakat tidak mengetahui siapa tokoh yang berpengaruh dalam proses pemekaran tersebut yang pada dasarnya kondisi social budaya tidak menjadi sebuah penghambat dalam proses pemekaran tersebut. kondisi social politik juga berpengaruh dalam proses pemekaran ini dimana bupati bone yang menjabat menjanjikan percepatan proses pemekaran dalam kampanyenya; Faktor yang menjadi kendala pemekaran daerah otonomi baru yaitu:

Dari dimensi social politik, masyarakat dan pemerintah kabupaten bone pada realitasnya tidak mengalami titik temu pada konteks pengawalan proses pemekaran Kab.Bone selatan, ini terlihat dari hasil wawancara yang telah di lakukan. Masyarakat menganggap pemerintah tidak sepenuh hati dalam mengawal pemekaran. Sedangkan pemerintah telah melakukan langkah langkah yang sebagai mana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

- Budiarjo, Miriam., 1986, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Faizal, Sanafiah., 2001, Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta.
- Saleh, H. A, 2008. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- J.Kaloh,Dr.,2007,mencari bentuk otonomi daerah ,Rineka Cipta,Jakarta.
- Kusnadi, Usman, M.Pd.Dr., 1996, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, Pengantar Antropologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 1997, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasyid, M. Ryass., 1997, Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soekanto, Sardjono., 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Grasindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, DR., 2004, Statistika Untuk Penelitian, CV Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah., 1993, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Dokumen dokumen

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Kabupaten Bone Dalam Angka 2012.

Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran
Kabupaten Bone Selatan (Andi Aswirman, Juanda Nawawi, Rabina Yunus)